

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alrasyid, Harun, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amrusyi, Fahmi, 1987, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, Media Sarana Press, Jakarta
- Arifin, Tajul, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Atmosudirjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bouger, 1952, *Masalah-masalah Demokrasi*, Yayasan Pembangunan, Jakarta
- Budiardjo, Miriam, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Djohermansyah, Djohan, 2003, *Kebijakan Otonomi Daerah 2009*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1997, *Penataan Hukum Administrasi, Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Huda, Nikmatul, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Husein, H.M. Wahyudin dan H. Hufron, 2008, *Hukum, Politik, dan Kepentingan*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ilmar, Aminudin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata*



Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta

Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T., 1985, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta

Latif, Abdul dan H. Hasbi, 1999, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Logemann, JHA, 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

Mahfud MD, Moh, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta

-----, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Manan, Bagir, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNISKA, Karawang.

-----, 1994, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

-----, 2000, *Teori dan Politik Konstitusi*, Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.

-----, 2004, *Menyongsong Otonomi Daerah*, PSH F. Hukum UII, Yogyakarta.

-----, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritis*, FH UII Press, Yogyakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Mayo, Henry B., 1977, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York

Muslimin, Amrah, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.

Nasution, Adnan Buyung, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: studi sosio-legal atas konstituante 1956-1959*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta



- Nurtjahjo, Hendra, 2005, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta
- Riyanto, Astim, 2006, *Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, YAPEMDO, Bandung
- Saragih, Bintan Regen, 2006, *Politik Hukum*, CV Utomo, Bandung.
- Setiawan, Dian Bakti, 2011, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Soehino, 1993, *Hukum Tata Negara: Sistem Pemerintahan Negara*, Liberty, Yogyakarta
- , 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Soejito, Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekarno, 1965, *Dibawah Bendera Revolusi jilid II*, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta
- Soemantri, Sri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta
- Strong, CF, 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nusa Media, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaukani, Imam, dan Ahsin Thohari, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Suny, Ismail, 1977, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.



Umar, Husein, 2005, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahjono, Padmo, 1984, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1143

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2778

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5943

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1843

Jurnal

Mezak, Hendry Meray, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review Vol. V No. 3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Reumi, Frans, 2015, *Semangat Otonomi Khusus dan Sistem Federal dalam Mempertahankan NKRI*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Vol 14 No 2

Syafrudin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung

Internet

Anti-Corruption Clearing House KPK, Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan, <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> diakses pada tanggal 17 Januari, 2018

Aritonang, Deytri Robekka, *Mendagri: Tuntut DPRD yang Tak Berhentikan Kepala Daerah “Nyaleg”*, <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/13/1921332/Mendagri.Tuntut.DPRD.yang.Tak.Berhentikan.Kepala.Daerah.Nyaleg>.

Asril, Sabrina, *Di RUU Pemda, Pemerintah Berikan Kewenangan Jokowi Pecat Kepala Daerah*, <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/17/17281271/Di.RUU.Pemda.Pemerintah.Berikan.Kewenangan.Jokowi.Pecat.Kepala.Daerah>

Komisi Pemilihan Umum, Laporan Pasangan Calon Tahap Penetapan, Daftar Wilayah 1 (satu) Paslon Ditetapkan Memenuhi Syarat <http://www.infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/paslon/detailJmlPaslon/tahapPenetapan/1>

Fadlil, Ken Miryam Vivekananda, 2014, *Siasat Resentralisasi Pemerintah Pusat*,



Lentera Timur edisi 27 September 2014,
<http://archive.lenteratimur.com/2014/09/siasat-resentralisasi-pemerintah-pusat/>

Kementrian Dalam Negeri, 2014, *Berita: Kemendagri Kemukakan Tiga Alasan Merevisi UU Pemda*,
<http://www.kemendagri.go.id/news/2014/04/25/mendagri-kemukakan-tiga-alasan-merevisi-uu-pemerintahan-daerah>

Kuswandi, *Mendagri: Tahun 2004 – 2017, 313 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Korupsi*, JawaPos online
<https://www.jawapos.com/read/2017/12/11/173981/mendagri-tahun-20042017-313-kepala-daerah-tersangkut-kasus-korupsi> diakses 18 Januari, 2018

Rahmi, Novrieza, 2017, *Sengkaret Sengketa Pilkada 2017: Sembari Membandingkan, Yuk Tengok “Metamorfosis” Pemberhentian Kepala Daerah*,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f5d770e49ec/sengkaret-sengketa-pilkada-2017>

Dokumen

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/Khs/2017

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128 K/TUN/2017

Risalah Rapat Kerja RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1999

Risalah Rapat Panitia Khusus RUU tentang Pemerintah Daerah

Lain-lain

Alrasyid, Harun, 2002, *Kajian Sistem Pemerintahan dan Ruang Lingkupnya*, Majalah Mahasiswa Universitas Pasundan Vol. 3 No. III Juni, Bandung

Manan, Bagir, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung